

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* merupakan indikator komposit yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 dalam *Human Development Report* sebagai respon terhadap pendekatan pembangunan yang terlalu menekankan aspek ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), tanpa memperhatikan dimensi kesejahteraan manusia secara menyeluruh (Mishrif, 2024). IPM digunakan untuk menilai sejauh mana suatu negara mampu menyediakan kondisi kehidupan yang layak bagi penduduknya melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak, sedangkan penurunan IPM menunjukkan adanya hambatan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan, atau rendahnya kualitas tata kelola publik (Khan, 2021). Dimensi kesehatan diukur melalui angka harapan hidup saat lahir (*life expectancy at birth*), yang mencerminkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan serta tingkat gizi dan kualitas lingkungan hidup. Dimensi pendidikan diukur menggunakan dua indikator, yakni rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*), yang mencerminkan capaian dan potensi pendidikan penduduk. Sementara itu, dimensi standar hidup diukur berdasarkan pendapatan nasional bruto per kapita (*Gross National Income per capita*) dengan penyesuaian paritas daya beli (*purchasing power parity*). Ketiga

dimensi tersebut dihitung menggunakan pendekatan geometrik untuk menghasilkan satu nilai indeks antara 0 hingga 1; semakin mendekati angka 1 menunjukkan tingkat pembangunan manusia yang semakin tinggi (Todaro & Smith, 2020).

Secara umum, negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok telah berhasil mencapai tingkat IPM yang relatif tinggi dan lebih merata melalui investasi berkelanjutan pada pendidikan, kesehatan, serta penguatan institusi publik. Sebaliknya, di Asia Tenggara masih terdapat kesenjangan IPM yang cukup lebar antarnegara, di mana sebagian negara mencapai IPM tinggi, sementara negara lainnya berada pada kategori menengah bahkan mendekati rendah. Permasalahan ini mencerminkan belum optimalnya kualitas pembangunan manusia, yang ditandai oleh ketimpangan akses pendidikan, disparitas layanan kesehatan. Dibandingkan dengan Asia Selatan yang meskipun memiliki tingkat IPM lebih rendah secara agregat, beberapa negara telah menunjukkan perbaikan signifikan melalui kebijakan sosial yang terarah, Asia Tenggara justru menghadapi tantangan konsistensi dan efektivitas kebijakan pembangunan manusia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan kualitas pembangunan manusia secara merata, sehingga isu IPM tetap menjadi permasalahan krusial dalam agenda pembangunan kawasan ini.

Penelitian ini memfokuskan analisis pada lima negara ASEAN, yaitu Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia, dari total sepuluh negara anggota ASEAN. Pemilihan kelima negara tersebut didasarkan pada pertimbangan keragaman tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta dinamika indikator

ekonomi dan kelembagaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Malaysia merepresentasikan negara dengan capaian IPM tertinggi di kawasan Asia Tenggara, sementara Indonesia dan Filipina berada pada kelompok dengan IPM relatif lebih rendah. Thailand dan Vietnam berada pada posisi menengah, sehingga secara keseluruhan sampel mencerminkan spektrum tingkat pembangunan manusia yang beragam di ASEAN.

Selain itu, kelima negara tersebut merupakan perekonomian utama dan berkembang di kawasan ASEAN yang memiliki kontribusi signifikan terhadap dinamika ekonomi regional. Negara-negara ini secara konsisten mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir, didukung oleh peningkatan aktivitas produksi, perdagangan internasional, serta integrasi dalam rantai nilai global. Di samping itu, arus *Foreign Direct Investment* (FDI) yang masuk ke masing-masing negara menunjukkan tingkat daya tarik investasi yang berbeda-beda, yang mencerminkan variasi dalam stabilitas makroekonomi, kualitas regulasi, serta iklim usaha. Kebijakan pengeluaran pemerintah juga memainkan peran penting, khususnya dalam pembiayaan sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Lebih lanjut, tingkat *control of corruption* (CoC) di masing-masing negara menunjukkan perbedaan dalam efektivitas tata kelola pemerintahan dan kapasitas kelembagaan. Variasi dalam laju pertumbuhan ekonomi, besaran FDI, kualitas pengendalian korupsi, serta alokasi pengeluaran pemerintah tersebut memberikan

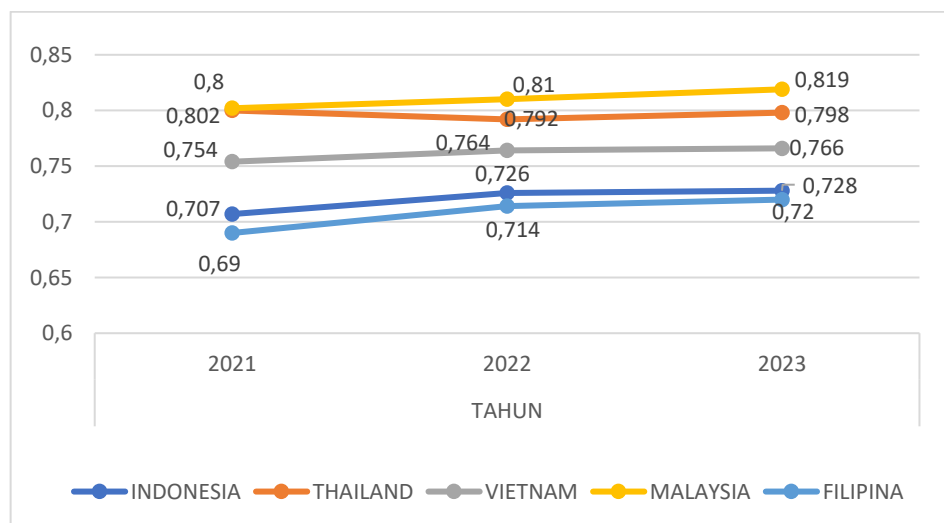
landasan empiris yang kuat untuk menganalisis perbedaan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM),

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada beberapa faktor yang diduga memengaruhi perbedaan capaian IPM di negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam dan Filipina. Faktor-faktor tersebut meliputi laju pertumbuhan ekonomi, *foreign direct investment* (FDI), *control of corruption*, serta pengeluaran pemerintah. Variabel-variabel ini dipilih karena secara teoretis dan empiris memiliki keterkaitan dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas institusi, serta penyediaan layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan menganalisis pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap IPM, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penyebab kesenjangan pembangunan manusia di Asia Tenggara.

Gambaran salah satu studi empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi publik memiliki hubungan positif terhadap peningkatan IPM. Misalnya, (Rahman & Lin, 2020) Menemukan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan di kawasan Asia Tenggara berkontribusi signifikan terhadap peningkatan IPM, karena kedua sektor tersebut berperan langsung dalam memperluas kapasitas sumber daya manusia. penelitian ini menyajikan Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada beberapa negara Asia Tenggara khususnya pada lima negara, berikut disajikan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan

Filipina selama periode 2010-2023 dan mengambil sample hanya periode 2021-2023.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi pembangunan manusia di kawasan Asia Tenggara, khususnya pada lima negara yaitu Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina yang menjadi fokus penelitian, berikut disajikan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) penyajian data ini bertujuan untuk menunjukkan perbedaan tingkat dan perkembangan IPM antarnegara, sehingga dapat menjadi dasar dalam menganalisis dinamika serta faktor-faktor yang memengaruhi capaian pembangunan manusia di masing-masing negara.



Gambar 1. 1 Data Indeks Pembangunan Manusia di 5 Negara Asia Tenggara Periode 2010-2023 (Indeks)

Sumber: *Human Development Index(2025)*

Pergerakan grafik indeks pembangunan manusia (IPM) pada periode 2021–2023 menunjukkan kecenderungan peningkatan di seluruh negara yang diamati, meskipun dengan laju yang berbeda-beda. Malaysia mencatat nilai IPM tertinggi sepanjang periode pengamatan dan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten

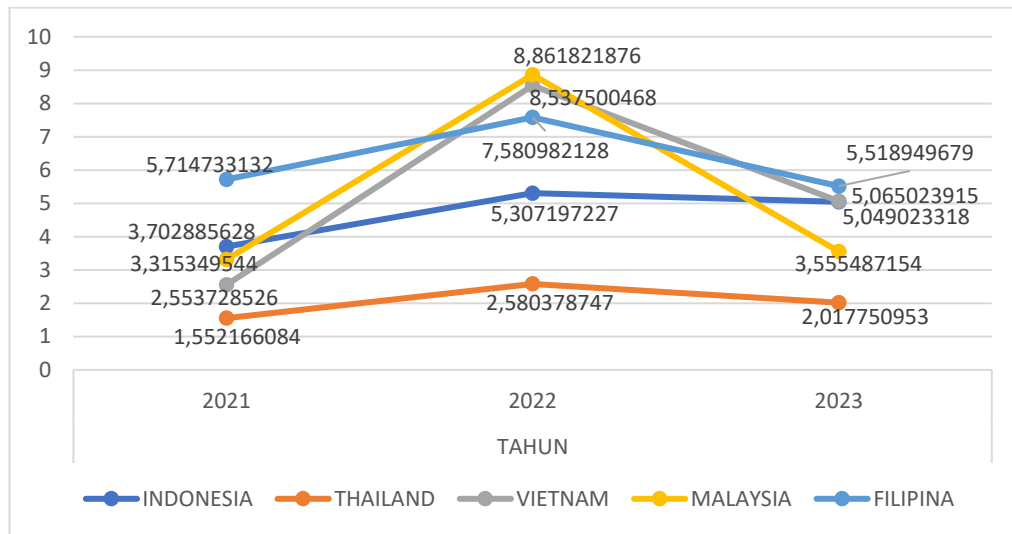
dari tahun ke tahun, mencerminkan keberhasilan dalam peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat. Thailand dan Vietnam juga mengalami peningkatan IPM secara bertahap, yang mengindikasikan adanya perbaikan pembangunan manusia yang relatif stabil. Indonesia dan Filipina memperlihatkan kenaikan IPM yang lebih moderat dibandingkan negara lainnya, namun tetap menunjukkan tren positif dari 2021 hingga 2023. Secara keseluruhan, pola peningkatan IPM ini mencerminkan adanya kemajuan pembangunan manusia di kawasan Asia Tenggara, meskipun masih terdapat kesenjangan capaian antar negara yang menunjukkan perbedaan kapasitas pembangunan dan efektivitas kebijakan publik masing-masing negara.

Data dalam tabel tersebut menggambarkan dinamika laju pertumbuhan ekonomi lima negara Asia Tenggara selama periode 2021–2023. Secara umum, terdapat variasi pola pertumbuhan yang mencerminkan respons berbeda dari masing-masing negara terhadap kondisi ekonomi domestik maupun global.

Perbedaan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antarnegara tidak terlepas dari kondisi dan kinerja perekonomian masing-masing negara. IPM sebagai indikator multidimensi mencerminkan hasil akhir dari berbagai proses pembangunan, salah satunya adalah dinamika pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kapasitas produksi, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, serta standar hidup yang layak. Oleh karena itu, untuk memahami variasi IPM antarnegara ASEAN secara lebih komprehensif, penting untuk menganalisis laju pertumbuhan ekonomi sebagai

salah satu faktor yang memengaruhi pencapaian pembangunan manusia laju pertumbuhan ekonomi mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi suatu negara yang berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan dapat meningkatkan kesempatan kerja serta pendapatan masyarakat, sehingga mendorong kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Laju pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai indikator kinerja makroekonomi, tetapi juga sebagai cerminan kemampuan perekonomian dalam mendukung peningkatan kesejahteraan dan pembangunan manusia secara berkelanjutan dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan indeks pembangunan manusia (IPM) karena peningkatan aktivitas ekonomi mencerminkan bertambahnya kapasitas suatu negara dalam menyediakan pendapatan, lapangan kerja, serta pembiayaan bagi sektor Pendidikan dan kesehatan yang menjadi komponen utama pembentukan kualitas manusia. Indikator untuk menunjukkan kemampuan perekonomian dalam menciptakan pertumbuhan output yang berpotensi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan manusia. Dibawah ini disajikan data laju pertumbuhan ekonomi untuk menggambarkan perkembangan kinerja ekonomi di negara Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia dan Filipina pada tahun 2021-2023.



Gambar 1. 2 Data Laju Pertumbuhan Ekonomi di 5 Negara Asia Tenggara Periode 2021-2023 (Persen)

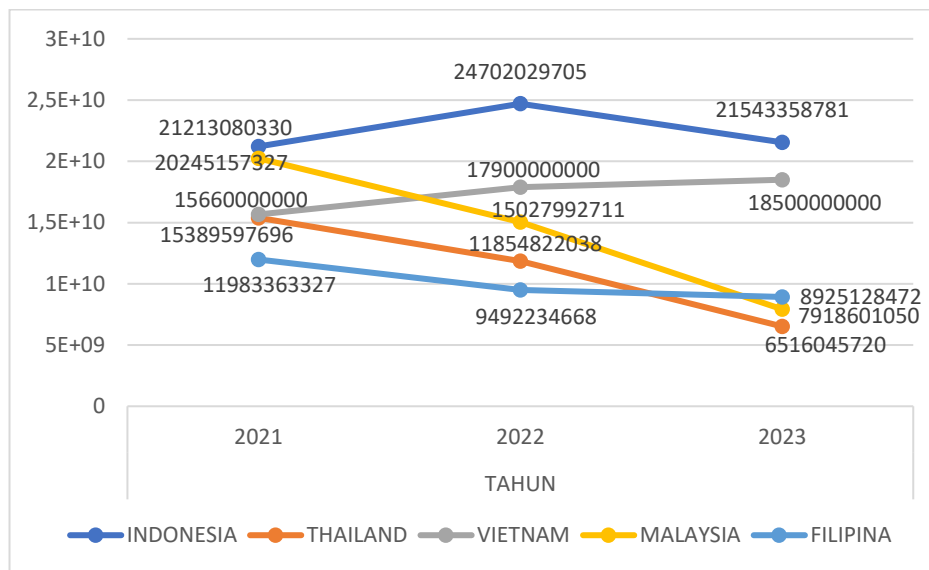
Sumber: *World Bank Development Indicator (2025)*

Grafik laju pertumbuhan ekonomi pada periode 2021–2023 menunjukkan adanya fluktuasi pertumbuhan antar negara di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2022, seluruh negara yang diamati mengalami peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2021, yang mencerminkan pemulihan ekonomi pascapandemi. Malaysia dan Vietnam mencatat lonjakan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022, sebelum mengalami perlambatan yang cukup signifikan pada tahun 2023. Filipina juga menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang kuat pada 2022, namun kembali melambat pada 2023 meskipun tetap berada pada tingkat yang relatif lebih tinggi dibandingkan Indonesia dan Thailand. Indonesia memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara moderat dari 2021 ke 2022 dan relatif stabil pada 2023, mencerminkan ketahanan ekonomi yang cukup baik. Sementara itu, Thailand menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi terendah di antara negara yang dianalisis, dengan peningkatan terbatas pada 2022 dan kembali

melambat pada 2023. Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi kawasan bersifat tidak merata dan dipengaruhi oleh perbedaan struktur ekonomi serta respons kebijakan di masing-masing negara.

Dalam konteks negara berkembang, termasuk Asia Tenggara, FDI yang terkonsentrasi pada sektor padat modal dan berorientasi ekspor sering kali memberikan dampak yang terbatas terhadap peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, sehingga pengaruhnya terhadap IPM menjadi kurang optimal (Kaukab et al., 2021). Oleh karena itu, FDI dapat menjadi peluang sekaligus permasalahan dalam peningkatan IPM apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pembangunan manusia yang inklusif. *Foreign Direct Investment* (FDI) berperan penting dalam proses pembangunan ekonomi dan sosial karena dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja yang berpotensi meningkatkan kualitas hidup Masyarakat (Bisnis et al., 2025)

Foreign Direct Investment (FDI) berhubungan dengan peningkatan IPM karena masuknya modal asing dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, alih teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran mengenai fluktuasi dan arus *Foreign direct investment* di Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia dan Filipina pada tahun 2021-2023 berikut disajikan grafik perkembangan FDI sebagai dasar analisis lebih lanjut.



Gambar 1. 3 Data *Foreign direct invesment* di 5 Negara Asia tenggara Periode 2021-2023 (Current USD)

Sumber: *World Bank Development Indicator* (2025)

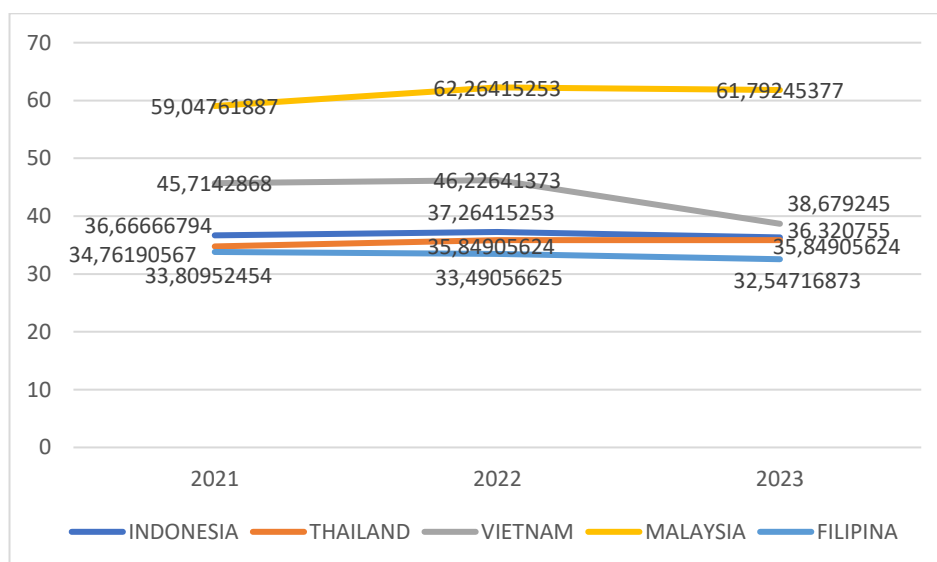
Grafik *Foreign Direct Investment* (FDI) pada periode 2021–2023 menunjukkan dinamika arus investasi asing yang berbeda antar negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia mencatat nilai FDI tertinggi sepanjang periode pengamatan, dengan peningkatan signifikan dari tahun 2021 ke 2022, sebelum mengalami penurunan pada tahun 2023 meskipun tetap berada pada level yang relatif tinggi. Vietnam menunjukkan tren peningkatan FDI yang konsisten selama tiga tahun berturut-turut, mencerminkan daya tarik investasi yang semakin kuat dan stabilitas iklim usaha yang relatif terjaga. Sebaliknya, Thailand dan Malaysia mengalami penurunan FDI secara berkelanjutan dari 2021 hingga 2023, yang mengindikasikan melemahnya arus investasi asing atau adanya pergeseran preferensi investor. Filipina juga menunjukkan tren penurunan FDI dari 2021 ke 2022, namun kembali mengalami peningkatan pada 2023 meskipun belum mampu

menyamai tingkat investasi pada awal periode pengamatan. Secara keseluruhan, perbedaan pola FDI ini mencerminkan variasi kondisi makroekonomi, stabilitas kebijakan, dan daya saing investasi di masing-masing negara, yang berpotensi memengaruhi kinerja pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia.

Masuknya investasi asing diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan perluasan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan. Namun, efektivitas FDI dalam meningkatkan IPM tidak selalu bersifat otomatis, karena sangat bergantung pada lingkungan kelembagaan dan tata kelola di negara penerima. Dalam kondisi tata kelola yang lemah, manfaat FDI berisiko tidak terdistribusi secara optimal dan bahkan dapat memperlebar ketimpangan sosial. Oleh karena itu, selain faktor ekonomi seperti FDI, aspek kelembagaan menjadi elemen penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan manusia. Salah satu indikator utama kualitas kelembagaan adalah tingkat pengendalian korupsi atau *Control of corruption* yang mencerminkan sejauh mana kekuasaan publik digunakan secara efektif. Tingkat korupsi yang rendah memungkinkan alokasi sumber daya publik berjalan lebih efisien, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian korupsi memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan IPM dan menjadi faktor pelengkap yang menentukan apakah manfaat FDI dapat benar-benar berkontribusi pada pembangunan manusia secara berkelanjutan.

Lemahnya pengendalian korupsi dapat menghambat pembangunan manusia karena mengurangi efektivitas belanja publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar. Akibatnya, peningkatan kualitas hidup masyarakat tidak tercapai secara optimal, sehingga berdampak pada rendahnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebaliknya, pengendalian korupsi yang baik mendorong alokasi sumber daya yang lebih efisien dan tepat sasaran, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap peningkatan IPM.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran mengenai kualitas tata kelola pemerintahan, disajikan data *Control of corruption* pada negara-negara yang diteliti. Data ini digunakan untuk menunjukkan variasi tingkat pengendalian korupsi antarnegara, yang menjadi salah satu faktor penting dalam menjelaskan perbedaan capaian



Gambar 1. 4 Data *Control of corruption* di 5 Negara Asia Tenggara Periode 2021-2023 (Persen)

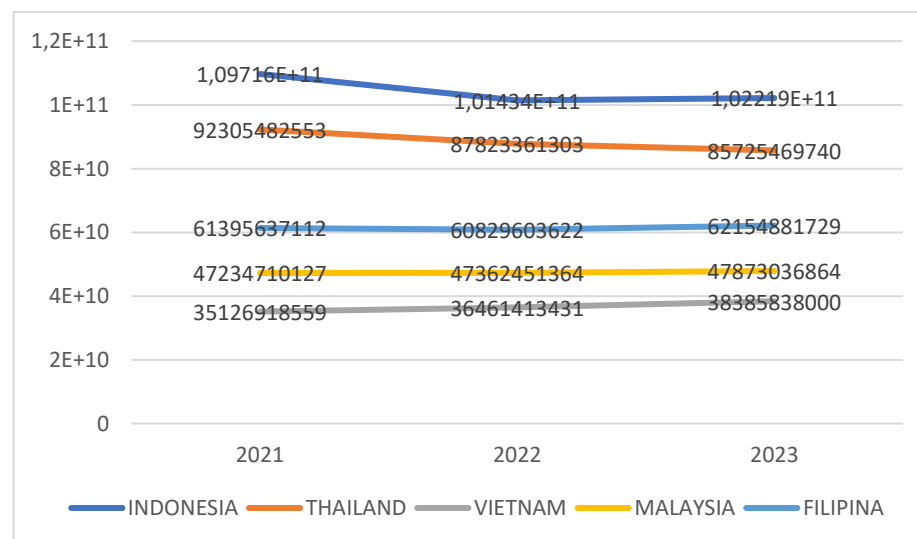
Sumber: *World Bank Development Indicator* (2025)

Berdasarkan data *percentile rank Control of Corruption* periode 2021–2023, terlihat adanya dinamika kualitas pengendalian korupsi di masing-masing negara. Indonesia menunjukkan peningkatan pada tahun 2022 dibandingkan 2021, namun kembali mengalami penurunan pada 2023, yang mengindikasikan bahwa perbaikan pengendalian korupsi belum berlangsung secara konsisten. Thailand memperlihatkan tren peningkatan dari 2021 ke 2022 dan relatif stabil hingga 2023, mencerminkan kondisi pengendalian korupsi yang cenderung stagnan pada level menengah. Vietnam mencatat peningkatan pada 2022, namun mengalami penurunan cukup signifikan pada 2023, yang mengindikasikan melemahnya efektivitas institusi pengendali korupsi pada periode tersebut. Malaysia memiliki nilai *percentile rank* tertinggi di antara negara yang diamati, dengan peningkatan tajam pada 2022 dan tetap berada pada level tinggi pada 2023, meskipun mengalami sedikit penurunan. Sementara itu, Filipina menunjukkan tren penurunan secara berkelanjutan selama tiga tahun berturut-turut, yang mengindikasikan melemahnya kualitas pengendalian korupsi. Secara keseluruhan, perbedaan pola ini mencerminkan variasi kapasitas kelembagaan dan efektivitas tata kelola pemerintahan antar negara di kawasan Asia Tenggara.

Laju pertumbuhan ekonomi, *Foreign Direct Investment (FDI)*, dan *Control of corruption (CoC)* mencerminkan kondisi ekonomi dan kualitas kelembagaan yang berperan dalam mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun, pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap IPM tidak selalu berlangsung secara langsung tanpa dukungan kebijakan publik. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah menjadi instrumen penting untuk menyalurkan hasil

pertumbuhan ekonomi, investasi asing, dan tata kelola yang baik ke dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan IPM.

Untuk menggambarkan peran pemerintah dalam mendukung pembangunan manusia, disajikan data Pengeluaran Pemerintah pada negara-negara yang menjadi objek penelitian. Data ini digunakan untuk menunjukkan variasi tingkat pengeluaran pemerintah antarnegara



Gambar 1. 5 Data Pengeluaran Pemerintah di 5 Negara Asia Tenggara Periode 2021-2023 (Current USD)

Sumber: *World Bank Development Indicator (2025)*

Berdasarkan grafik pengeluaran pemerintah tahun 2021–2023, terlihat adanya perbedaan pola alokasi belanja publik antar negara Asia Tenggara. Indonesia menunjukkan tingkat pengeluaran pemerintah yang relatif tinggi dibandingkan negara lain, meskipun mengalami kontraksi pada tahun 2022 sebelum kembali meningkat pada tahun 2023. Thailand memperlihatkan kecenderungan penurunan pengeluaran pemerintah secara berkelanjutan selama periode

pengamatan, yang dapat mencerminkan penyesuaian kebijakan fiskal pascapandemi. Filipina menunjukkan pergerakan yang relatif stabil dengan fluktuasi yang terbatas, sedangkan Malaysia dan Vietnam mengalami peningkatan pengeluaran pemerintah secara bertahap dan konsisten dari tahun ke tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa strategi fiskal yang diterapkan masing-masing negara berbeda, baik dalam hal kapasitas anggaran maupun prioritas pembangunan, yang selanjutnya berpotensi memengaruhi efektivitas peran pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial..

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang umumnya menganalisis faktor ekonomi makro, investasi asing, atau pengeluaran pemerintah secara terpisah dan menunjukkan hasil yang beragam, khususnya terkait peran *Foreign Direct Investment* (FDI) dan kualitas institusi. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan faktor ekonomi, kelembagaan (*control of corruption*) dan kebijakan fiskal dalam satu model empiris lintas negara Asia Tenggara dengan periode pengamatan pasca pandem atau covid 19 masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menguji secara simultan pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, *Foreign direct invesment*, *control of corruption*, dan pengeluaran pemerintah terhadap IPM menggunakan data panel lima negara Asia Tenggara yaitu Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia dan Filipina pada periode 2010–2023, sehingga memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai determinan pembangunan manusia di kawasan tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka pertanyaan penelitian yang di hasilkan untuk di eksplorasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, *foreign direct invesmet*, *control of corruption*, pengeluaran pemerintah secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia studi kasus 5 negara asia tenggara pada tahun 2010-2023?
2. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, *foreign direct investment*, *control of corruption*, pengeluaran pemerintah secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia studi kasus 5 negara asia tenggara pada tahun 2010-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, *foreign direct invesmet*, *control of corruption*, pengeluaran pemerintah secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia studi kasus 5 negera asia tenggara pada tahun 2010-2023.
2. Mengetahui pengaruh pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, *foreign direct invesmet*, *control of corruption*, pengeluaran pemerintah secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia studi kasus 5 negera asia tenggara pada tahun 2010-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang di harapkan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah
 - 1) Sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan manusia yang berfokus pada peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
 - 2) Menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas pengeluaran publik dan menekan korupsi agar pertumbuhan ekonomi dan FDI berdampak langsung pada peningkatan IPM.
- b. Bagi akademisi
 - 1) Menjadi bahan ajar atau studi kasus dalam bidang ekonomi pembangunan, ekonomi makro, dan kebijakan public.
 - 2) Mengembangkan kajian lebih mendalam mengenai hubungan antar variabel ekonomi dan pembangunan manusia di berbagai negara
- c. Bagi pembaca
 - 1) Memberikan pemahaman tentang faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi kualitas hidup dan pembangunan manusia di negara berkembang.
 - 2) Meningkatkan kesadaran pentingnya tata kelola yang baik dan penggunaan anggaran yang tepat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di 5 negara Asia Tenggara Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia dan Filipina. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Tasikmalaya melalui pengambilan data sekunder pada *World Bank Development Indicator* yang menyajikan data Pertumbuhan Ekonomi, *Foreign Direct Investment*, *Control Of Corruption*, Pengeluaran Pemerintah dan pada *Human Development Indeks* untuk pengambilan data Indeks Pembangunan Manusia.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini di mulai pada bulan Oktober 2025 dengan melakukan pengajuan judul. Selanjutnya tahap sidang kepada pihak program studi Ekonomi Pembangunan dilaksanakan bulan Desember 2025. Adapun matriks jadwal penelitian adalah sebagai berikut

Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2025-2026																		
		Okt				Nov	Desember				Jan	Feb	Mar	April				Mei		
		1	2	3	4		1	2	3	4				1	2	3	4	1	2	3
1	Pengajuan judul	■	■																	
2	Penyusunan usulan penelitian			■	■	■	■	■												
3	Sidang usulan penelitian							■												
4	Revisi usulan penelitian							■	■	■	■									
5	Penyusunan seminar hasil												■	■						
6	Sidang seminar hasil													■						
7	Revisi seminar hasil														■					
8	Penyusunan hasil skripsi																■			
9	Sidang skripsi																	■		
10	Revisi skripsi																	■	■	